



KORAN	HAL
Haluan	13
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



HANTARAN RANPERDA — Penyerahan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 oleh Wali Kota Erman Safar kepada Ketua DPRD Herman Sofyan, dalam rapat paripurna DPRD Bukittinggi, Senin (7/6). GATOT

Wako Antar Ranperda Pertanggungjawaban APBD

BUKITTINGGI, HALUAN — Wali Kota Bukittinggi menghantarkan secara resmi rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 dalam rapat paripurna DPRD Bukittinggi di Gedung dewan setempat, Senin (7/6).

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menyampaikan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi tahun anggaran 2020 kepada DPRD dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dan peraturan menteri

Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan peraturan itu, maka kepala daerah wajib menyampaikan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 memuat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang terdiri dari tujuh laporan, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Ang-

garan Lebih (LPSAL), Neraca Daerah, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Catatan Atas Laporan Keuangan (LAK),” kata Erman Safar.

Ia menyebutkan, untuk LRA tahun 2020, pendapatan pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp690 miliar lebih dan teralisasi Rp689 miliar lebih atau 99,75%. Anggaran belanja daerah dan transfer tahun 2020 ditetapkan Rp882 miliar lebih dengan realisasi Rp795 miliar lebih atau serapan anggaran sebesar 90,14%. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja diperoleh defisit sebesar Rp107 miliar

lebih,” ungkapnya.

Untuk pos pembiayaan daerah tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp192 miliar lebih dan direalisasikan sebesar Rp107,31% yakni sebesar Rp206 miliar lebih. Secara keseluruhan pelaksanaan APBD 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp99 miliar lebih.

“Atas nama Pemko Bukittinggi, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang telah ikut mengambil bagian di dalam pembangunan Kota Bukittinggi. Kami berharap dalam kepemimpinan kami ini, peran dan bagian tersebut dapat ditingkat-

kan demi Kota Bukittinggi,” ujar Erman Safar.

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan mengapresiasi hantaran ranperda yang disampaikan Wali Kota dalam rapat paripurna DPRD. Laporan yang disampaikan ini akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing fraksi dalam paripurna berikutnya.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD, dan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama,” ujar Herman Sofyan. (h/tot)